

**ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TERHADAP PENCAPAIAN
TARGET FISIK PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021**

Alifa Faradila A.S.¹, M. Astri Yulidar Abbas², Pantas Pardede³

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Correspondent: alifafaradillaifa@gmail.com

Abstract

This study uses a quantitative research type method. The population of this study is the Social Services Budget of East Kalimantan Province. The sampling technique is purposive sampling, limited to the 2021 Budget for the Social Service of the Province of East Kalimantan. Data analysis includes the effectiveness and efficiency of the budget. The results of the research on the level of effectiveness of implementing the direct budget for achieving physical targets at the East Kalimantan Province Social Service in 2021 with a value of 88.98% means it is quite effective. Likewise, the level of effectiveness in implementing the direct budget for achieving the physical target at the East Kalimantan Provincial Social Service in 2021 with a value of 88.64% means it is quite effective. The level of efficiency in implementing the indirect budget for achieving the physical target at the East Kalimantan Provincial Social Service in 2021 with a value of 68.17% means efficient. Meanwhile, the level of efficiency in implementing the direct budget for achieving physical targets at the East Kalimantan Provincial Social Service in 2021 with a value of 31.41% means very efficient.

Keywords: *Effectiveness, Efficiency, Budget*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah Anggaran Belanja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Teknik penarikan sampel adalah *purposive sampling* dibatasi pada Anggaran Belanja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021. Analisis data meliputi efektifitas dan efisiensi anggaran belanja. Hasil penelitian tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran belanja langsung terhadap pencapaian target fisik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dengan nilai 88.98% artinya cukup efektif. Begitupula tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran belanja langsung terhadap pencapaian target fisik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dengan nilai 88.64% artinya cukup efektif. Tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung terhadap pencapaian target fisik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dengan nilai 68.17% artinya efisien. Sedangkan tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja langsung terhadap pencapaian target fisik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dengan nilai 31.41% artinya sangat efisien.

Kata Kunci: Efektifitas, Efisiensi, Anggaran Belanja

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini negara Indonesia merupakan sebagian dari beberapa masyarakat yang memiliki kewajiban secara terus-menerus untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Guna untuk menunjang persaingan dalam era globalisasi. Adanya paradigma tersebut yang mana telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada umumnya aktivitas satker akan dinilai baik jika yang bersangkutan mampu dalam melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Tuntutan baru untuk satker yaitu selalu memperhatikan *value for money*. Efektivitas dan efisien diartikan sebagai pengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan sosial yang ada di daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yakni dalam penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan, dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Berdasarkan data kaltim.bps.go.id, Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan sedangkan di perdesaan mengalami penurunan, baik secara absolut maupun secara persentase. Selama periode September 2019-Maret 2020, jumlah penduduk miskin sebesar 230,26 ribu (6,10 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 sebesar 220,91 ribu (5,91 persen), berarti jumlah penduduk miskin secara absolut bertambah sebanyak 9,35 ribu orang dan secara persentase bertambah sebesar 0,19 persen. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan mengalami kenaikan, baik secara absolut maupun persentase. Berdasarkan website dinsos.kaltim.go.id, Jumlah penduduk lanjut usia di Kalimantan Timur mencapai 81.653 jiwa.

Perlu upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur agar dilaksanakan dengan terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara masih banyak menemukan permasalahan yakni pelayanan yang tidak sesuai target seperti dalam laporan program tahun 2021 berikut :

Tabel 1. Target Laporan Program Dinas Sosial Provinsi Kaltim

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	48.786.377.621	43.443.099.834	89.05
2	Program pemberdayaan sosial	254.290.100	245.897.100	96.70
3	Program rehabilitasi sosial	11.713.350.584	10.395.876.135	88.75
4	Program perlindungan dan jaminan sosial	1.172.304.800	996.285.000	84.99
5	Program penanganan bencana	781.548.800	710.807.800	90.95
6	Program pengelolaan taman makam pahlawan	545.710.000	540.176.810	98.99
	Total	63,253,581,905	56,332,142,679	

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kaltim, 2021

Tabel 2. Pencapaian Target Fisik Dinas Sosial Provinsi Kaltim

No	Kegiatan	Target Fisik	Realisasi Capaian	%
1	Bantuan UEP	300 KK	295 KK	98.33
2	Permakanan dalam Panti	1000 Org	900 Org	90.00
3	Bencana Alam	1000 KK	980 KK	88.00
4	Bantuan KUBE	100 KK	97 KK	97.00
5	Bantuan Rawan Sosial	50 KK	49 KK	89.00

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kaltim, 2021

Tabel 3. Pencapaian Target Keuangan Dinas Sosial Provinsi Kaltim

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Bantuan UEP	130.000.000	127.750.000	98.26
2	Permakanan dalam Panti	400.000.000	375.000.000	93.75
3	Bencana Alam	433.840.000	380.000.000	87.58
4	Bantuan KUBE	300.000.000	290.000.000	96.66
5	Bantuan Rawan Sosial	150.000.000	132.000.000	88.00

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kaltim, 2021

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Menurut Halim (2016) pengertian keuangan daerah adalah “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan /peraturan perundangan yang berlaku”.

Penganggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2016) mengemukakan penganggaran sektor publik terkait dengan “proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun”.

Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tersebut, Akuntansi Pemerintah Daerah atau Akuntansi Keuangan Daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Laporan Realisasi Anggaran

Mursyidi (2018) mengemukakan Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang disusun secara sistematis tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama suatu periode tertentu.

Efektifitas

Menurut Bastian (2015) efektifitas adalah “keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektifitas hanya berbicara masalah output saja. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif”.

Efisiensi

Adisasmita (2018) menjelaskan “efisiensi dapat dikatakan suatu kondisi atau keadaan dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki”.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian tergolong penelitian kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah Anggaran Belanja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* karena penentuan sampel dipilih

secara khusus berdasarkan tujuan penelitian dan didasarkan pula pada pertimbangan tertentu sehingga dibatasi pada Anggaran Belanja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021. Adapun analisis data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Efektifitas Anggaran Belanja

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Target Belanja Langsung}} \times 100\%$$

2. Efisiensi Anggaran Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Anggaran Belanja Tidak Langsung

Tabel 4. Analisis Tingkat Efektivitas Belanja Tidak Langsung Tahun 2021

No	Tahun	Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung (Rp)	Target Anggaran (Rp)	Efektivitas Anggaran Belanja Tidak Langsung (%)	Kriteria
1	2	3	4	$5 = \frac{3}{4} \times 100\%$	6
1	2021	38,400,996,597	43,155,906,162	88.98	Cukup Efektif

Sumber : Data diolah, 2022

Efektifitas Anggaran Belanja Langsung

Tabel 5. Analisis Tingkat Efektivitas Belanja Langsung Tahun 2021

No	Tahun	Realisasi Keuangan Belanja Langsung (Rp)	Target Anggaran (Rp)	Efektivitas Anggaran Belanja Langsung (%)	Kriteria
1	2	3	4	$5 = \frac{3}{4} \times 100\%$	6
1	2021	17,691,260,061	19,958,665,743	88.64	Cukup Efektif

Sumber : Data diolah, 2022

Efisiensi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Tabel 6. Analisis Tingkat Efisiensi Belanja Tidak Langsung Tahun 2021

No	Tahun	Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung (Rp)	Realisasi Anggaran Keuangan (Rp)	Efisiensi Anggaran Belanja (%)	Kriteria
1	2	3	4	$5 = \frac{3}{4} \times 100\%$	6
1	2021	38,400,996,597	56,332,142,679	68.17	Efisien

Sumber : Data diolah, 2022

Efisiensi Anggaran Belanja Langsung

Tabel 7. Analisis Tingkat Efisiensi Belanja Langsung Tahun 2021

No	Tahun	Realisasi Keuangan Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Anggaran Keuangan (Rp)	Efisiensi Anggaran Belanja (%)	Kriteria
1	2	3	4	$5 = \frac{3}{4} \times 100\%$	6
1	2021	17,691,260,061	56,332,142,679	31,41	Sangat Efisien

Sumber : Data diolah, 2022

Efektifitas Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja langsung terhadap pencapaian target fisik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dengan nilai 88.98%. Hal ini menunjukkan nilai rasio efektivitas tahun 2021 antara 80-90%, maka pelaksanaan anggaran belanja langsung tidak langsung terhadap pencapaian target fisik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dikatakan cukup efektif. Begitupula tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja langsung terhadap pencapaian target fisik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dengan nilai 88.64%. Hal ini menunjukkan nilai rasio efektivitas tahun 2021 antara 80-90%, maka pelaksanaan anggaran belanja langsung terhadap pencapaian target fisik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dikatakan cukup efektif.

Pelaksanaan anggaran belanja terhadap pencapaian target fisik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 cukup efektif. Hal ini dikarenakan realisasi belanja langsung lebih kecil dibandingkan target belanja langsung. Selain itu, dipengaruhi partisipasi dalam penyusunan anggaran, tingginya pencairan anggaran dan tepat waktunya administratif, sehingga tingkat efektivitas tercapai pada pelaksanaan anggaran belanja terhadap pencapaian target fisik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021. Didukung teori Sunaryo (2016:74) ada lima faktor yang mempengaruhi efektifitas, yaitu: partisipasi dalam penyusunan anggaran, tingkat kesulitan anggaran, keterlibatan manajemen puncak, peran departemen anggaran, dan laporan yang akurat dan tepat waktu.

Sesuai pula teori Tim Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Republik Indonesia (2012:107), yang mengemukakan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas anggaran belanja langsung faktor-faktor tersebut antara lain: rendahnya pencairan anggaran, keterlambatan administratif, kerumitan dalam proses persiapan anggaran, tingginya perbedaan

antara kegiatan yang diusulkan dan yang disetujui dalam DIPA, proses anggaran yang tidak fleksibel mendorong keterlambatan proses revisi DIPA, ketidak sesuaian insentif pejabat pengadaan dengan tingkat kesulitan proyek-proyek yang dihadapi dan tingginya pengendalian audit sehingga tidak mendorong pegawai negeri untuk menjadi tenaga spesialis pengadaan, kurangnya SDM dalam pembentukan panitia pengadaan dan kurangnya sosialisasi tentang peraturan baru.

Efisiensi Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung terhadap pencapaian target fisik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dengan nilai 68.17%. Hal ini menunjukkan nilai rasio efisiensi tahun 2021 yakni antara 60-80%, maka pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung terhadap pencapaian target fisik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dikatakan efisien. Sedangkan tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja langsung terhadap pencapaian target fisik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dengan nilai 31,41%. Hal ini menunjukkan nilai rasio efisiensi tahun 2021 yakni < 60%, maka pelaksanaan anggaran belanja langsung terhadap pencapaian target fisik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dikatakan sangat efisien.

Pelaksanaan anggaran belanja terhadap pencapaian target fisik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 sudah sangat efisien. Hal ini dikarenakan realisasi belanja langsung lebih kecil dari realisasi anggaran belanja. Dimana semakin besar tingkat penyerapan anggaran maka diharapkan semakin cepat tujuan program terlaksana. Sebaliknya, rendahnya realisasi anggaran akan menghasilkan dana menganggur yang tidak produktif dan seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat lain. Di sisi lain, kecilnya penyerapan anggaran dan fenomena penyerapan anggaran besar-besarnya di setiap akhir tahun akan mempengaruhi output dan outcome yang diharapkan dari program yang dianggarkan tersebut, mengganggu pertumbuhan ekonomi serta membuka celah penyalahgunaan.

Idealnya, besaran belanja langsung melampaui besaran belanja tidak langsung. Hal ini merupakan indikator kualitas belanja daerah dimana anggaran pendapatan harusnya dihabiskan lebih banyak kepada belanja langsung daripada belanja tidak langsung. Indikator lainnya adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan programnya yang dapat dilihat dari berapa besar realiasi belanjanya. Namun realitasnya berbeda dimana belanja tidak langsung seringkali

lebih besar dari belanja langsung dan bahkan realisasi anggaran belanja langsung masih jauh dari harapan.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan Anggaran Belanja terhadap pencapaian target fisik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 baik belanja langsung dan belanja tidak langsung yakni cukup efektif. Hal ini dikarenakan realisasi belanja langsung lebih kecil dibandingkan target belanja langsung. Selain itu, dipengaruhi partisipasi dalam penyusunan anggaran, tingginya pencairan anggaran dan tepat waktunya administrative.
2. Pelaksanaan Anggaran Belanja terhadap pencapaian target fisik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dilihat dari belanja tidak langsung yakni efisien dan belanja langsung yakni sangat efisien. Hal ini dikarenakan realisasi belanja langsung lebih kecil dari realisasi anggaran belanja. Dimana semakin besar tingkat penyerapan anggaran maka diharapkan semakin cepat tujuan program terlaksana. Sebaliknya, rendahnya realisasi anggaran akan menghasilkan dana menganggur yang tidak produktif dan seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2018. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi sektor publik: suatu pengantar*. Erlangga, Jakarta
- Dian, Selaksa Sukma. 2017. *Analisis Pelaksanaan anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2016*. Artikel Ilmiah
- Halim, Abdul. 2016. *Akuntansi Sektor Publik “Akuntansi Keuangan Daerah”*. Salemba Empat, Jakarta
- Herisitam. 2015. *Determinan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*. UT Perpustakaan Digital.
- Mahmudi. 2017. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN, ed. 2, Yogyakarta
- Mahsun, Mohamad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta
- Melania Rampengan, Grace B. Nangoi, Hendrik Manossoh. 2016. *Effectiveness And Efficiency Analysis Of Budgeting Of Development Planning Agency Of Manado City*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 03
- Mursyidi. 2018. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Jakarta
- Nurul Anisa dan Firman Pribadi. 2016. *Analisis Perencanaan, Penganggaran, dan Estimasi dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta*

- Pramita, P. R. 2015. *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rizkina, Bunga. 2018. *Dalam Analisis Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi
- Rustam. 2019. *Analisis Proses Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pada Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palu*. E-Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 5, hlm 209-216
- Yunina, Fitri dan Jumiati. 2018. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tengah*. Artikel Ilmiah